

## PERAN INSTITUSI LOKAL DALAM MEWUJUDKAN NAGARI MANDIRI PANGAN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

### THE ROLE OF LOCAL INSTITUTION IN MAKING NAGARI MANDIRI FOOD FOR POVERTY REDUCTION

<sup>1</sup>Indraddin, <sup>2</sup>Gusmini

<sup>1,2</sup>Jurusan Sosiologi Universitas Andalas, Padang

e-mail: <sup>1</sup>indrazainudin@yahoo.com ; <sup>2</sup>gusminianis@gmail.com

**Abstract.** Various efforts made by the government of West Sumatra to overcome the problem of poverty and increasing the welfare of the family, one of them is to realize the self-supporting nagari Pangan. As usual, poverty alleviation programs fail because the social conditions of society do not support the running of the program, because the values and norms that exist in the community or known as local social institutions do not match the program launched .. In particular this study to 1) describe the workings of social institutions local support for food self-sufficiency nagari program, 2) To analyze the cultural and structural barriers of the community in realizing the self-sustaining nagari of food. The approach used in this research is qualitative approach. The results show that social institutions that support the realization of food self-sufficiency nagari is that the availability of food in the family is considered important by the community, exceeding the importance of other needs such as clothing and shelter. The value of farming and raising that is still considered high by the community, can support the programs proposed by various parties to support the improvement of the welfare of the food field community. Ownership of land with a high system of heritage, positive for the availability of land in the nagari because it is not easy to change hands, because it is not easy to be traded. Cultural and structural barriers are found, and should be used as guidance in programming.

**Keywords:** local institutions, food security, cultural barriers, structural obstacles.

**Abstrak.** Berbagai usaha dilakukan pemerintah Sumatera Barat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, salah satunya adalah mewujudkan nagari mandiri Pangan. Seperti biasa, program pengentasan kemiskinan gagal karena kondisi sosial masyarakat tidak mendukung berjalannya program, karena nilai dan norma yang ada di masyarakat atau yang dikenal dengan institusi sosial lokal tidak cocok dengan program yang diluncurkan.. Secara khusus penelitian ini untuk 1) mendeskripsikan bekerjanya institusi sosial lokal mendukung program nagari mandiri pangan, 2) Menganalisis hambatan kultural dan struktural masyarakat dalam mewujudkan nagari mandiri pangan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusi sosial yang mendukung terwujudnya nagari mandiri pangan adalah bahwa ketersediaan pangan dalam keluarga adalah dianggap penting oleh masyarakat, melebihi pentingnya kebutuhan lain seperti sandang dan papan. Nilai bertani dan beternak yang masih dianggap tinggi oleh masyarakat, dapat mendukung program yang diajukan berbagai pihak mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat bidang pangan. Kepemilikan lahan dengan sistem pusaka tinggi, positif bagi ketersediaan lahan di nagari karena tidak mudah berpindah tangan, sebab tidak gampang untuk diperjualbelikan. Hambatan kultural dan structural ditemukan, dan perlu dijadikan pedoman dalam menyusun program.

**Kata kunci:** institusi lokal, ketahanan pangan, hambatan kultural, hambatan structural.

## 1. Pendahuluan

Masalah kemiskinan di tengah masyarakat berdampak kepada sulitnya ketersediaan pangan pada keluarga. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah, belum mampu secara optimal mengurangi angka kemiskinan, sehingga kemampuan masyarakat untuk menjaga ketersediaan pangan keluarga secara mandiri belum bisa terwujud. Padahal ketersediaan pangan tersebut telah diatur dalam konstitusi, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.

Penelitian tentang ketahanan pangan telah banyak dilakukan, namun lebih didominasi dari sisi budi daya pertanian. Ketersediaan pangan tidak hanya bisa diselesaikan dari sudut pandang teknis atau bidang pertanian, dari berkaitan dengan berbagai aspek, salah satunya adalah bidang social budaya. Penelitian ini melihat ketahanan pangan dari sudut pandang sosial budaya, tidak mengabaikan kajian pertanian itu sendiri. Pada tahun 2006 peneliti melakukan pemetaan masalah kemiskinan di Sumatera Barat. Dalam penelitian tersebut telah dihasilkan gambaran tentang permasalahan kemiskinan berdasarkan tipologi ekologi masyarakat. Misalnya pada masyarakat dengan pertanian lahan basah, lahan kering, pesisir pantai dan sebagainya. Pada tahun 2008 juga telah dilakukan penelitian tentang pengentasan kemiskinan berbasis nagari. Penelitian tersebut mendapatkan gambaran tentang program pengentasan kemiskinan yang dilakukan di nagari selama ini di Sumatera Barat, serta lembaga apa yang berpotensi melakukan program pengentasan kemiskinan berbasis nagari.

Hasil penelitian Indraddin (2011), salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin di nagari adalah masih rendahnya daya dukung permodalan. Permasalahan modal tidak hanya disebabkan oleh ketidakterediaan uang, tapi belum bekerjanya institusi lokal dalam mendukung terkelolanya potensi sumberdaya permodalan di tempat mereka. Institusi yang berpotensi diberdayakan diantaranya institusi keagamaan berbasis mesjid dan surau sebagai salah satu institusi lokal di nagari pada masyarakat Minangkabau, sebagaimana juga di tempat lain institusi keagamaan ini memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan umatnya.

Sumatera Barat pernah mencanangkan suatu program pengentasan kemiskinan yang disebut “Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari”. Bahkan program tersebut diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 21 September tahun 2006 di Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman,. Acara ini dihadiri 388 Wali Nagari, Bupati/Walikota, Camat dan Lurah se Sumatera Barat. Pada tahun 2007 Pemerintah provinsi meluncurkan program Kredit Mikro Nagari (KMN) ke setiap nagari sebesar 300 juta per-nagari. Program ini mensyaratkan lahirnya Lembaga Keuangan Mikro Nagari yang bertujuan mengelola KMN untuk membantu usaha masyarakat miskin. Namun sampai sekarang Lembaga Keuangan Mikro Nagari tersebut tidak berjalan sesuai harapan, dan umumnya KMN macet. Saat ini tidak jelas lagi keberadaan lembaga keuangan mikro yang dicanangkan tahun 2006 tersebut.

Banyak program pemberdayaan yang telah diterapkan dan masih diterapkan sampai saat ini. Negara donor yang memberikan bantuan baik dalam bentuk hutang maupun hibah umumnya mensyaratkan menggunakan sistem pemberdayaan masyarakat, karena diyakini program pemberdayaan masyarakat akan menumbuhkan kemandirian pada masyarakat miskin sehingga dapat mengembangkan dirinya. Upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan sejak lama dengan berbagai program. Misalnya, inpres desa tertinggal (IDT), program pemberdayaan daerah mengatasi dampak krisis ekonomi (PDM-DKE), dan program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM). Selain itu, terdapat banyak program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan berbagai kementerian dan lembaga. Misalnya, program pengembangan kecamatan (PPK), program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), proyek peningkatan masyarakat pesisir (P4K), dan Kelompok Usaha Bersama (Kube). Paling tidak, ada sekitar 55 program atau proyek yang dilaksanakan sekitar 19 departemen/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) sejak 2004. Pada tahun 2008 digulirkan lagi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Program tersebut sebenarnya bukan hal baru dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dengan diberlakukan UU No.6 tahun 2016 tentang Desa, memungkinkan banyak program bisa dilakukan oleh Nagari (Desa) untuk pengentasan kemiskinan.

Program pengentasan kemiskinan yang menggunakan perspektif pemberdayaan (*empowerment*) diantaranya : program yang diluncurkan Bank dunia, program yang berasal dari IMF, program bantuan Asian Development Bank (ADB), dimana mereka mengemukakan indikator sendiri dalam menilai tingkat kemiskinan. Indikator yang digunakan oleh bank dunia yang menggunakan pendapatan perkapita/orang perhari dalam dolar, menunjukkan angka kemiskinan 55 – 60 % di Indonesia pada tahun 2006. Begitu juga program pemberdayaan yang diterapkan banyak bersumber dari para donatur pinjaman luar negeri. Pemerintah maupun para ahli sepertinya terjebak dalam mitos. Mitos adalah suatu yang tidak benar, tapi dipercayai oleh banyak orang, termasuk para ahli. Padahal kita seharusnya terus mencari indikator-indikator kemiskinan dalam konsep lokal. Tidak hanya dalam lingkup Indonesia, tapi juga di tingkat lokal. Kita juga mestinya menemukan cara pengentasan kemiskinan dalam konteks lokal. Maka fokus penelitian ini adalah Melihat bekerjanya institusi sosial lokal mendukung program kemandirian pangan di nagari.

### **Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan bekerjanya institusi sosial lokal mendukung program nagari mandiri pangan.
2. Menganalisis hambatan kultural dan struktural masyarakat dalam mewujudkan nagari mandiri pangan.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.. Penelitian ini dilakukan Nagari Sikabu Kabupaten Padang pariaman dan Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam. Dipilihnya nagari ini karena termasuk nagari yang dicanangkan sebagai nagari mandiri pangan di kabupaten yang berbeda karakteristik masyarakat di wilayah adat Minangkabau yang merupakan etnik dominan di Sumatera Barat.

## 2. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian Indraddin (2011), tentang pengentasan kemiskinan berbasis nagari menunjukkan bahwa untuk menjamin keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat miskin perlu melibatkan insitusi local nagari. Institusi lokal yang dipakai sesuai karakteristik nagari masing-masing, karena berbeda nagari, berbeda juga institusi lokal yang dipercaya oleh masyarakat. Institusi lokal nagari perlu didukung oeh elemen lain, seperti orang kaya yang ada di kampung itu termasuk dana yang berasal dari perantau. Perantau terdiri dari dua bentuk, pertama di dalam negeri, kedua di luar negeri atau migrant internasional.

### 1. Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat

Konsep “pemberdayaan” (*empowerment*) telah mengubah konsep pembangunan dan sekaligus strategi bagaimana mengentaskan kemiskinan khususnya di pedesaan. Perubahan ini sering disebut orang sebagai perubahan paradigma atau serangkaian perubahan mulai dari tataran konsep, teori, nilai-nilai, metodologi sampai ke tataran pelaksanaannya.

Selain itu, terdapat banyak program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan berbagai kementerian dan lembaga. Misalnya, program pengembangan kecamatan (PPK), program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP), proyek peningkatan masyarakat pesisir (P4K), dan Kelompok Usaha Bersama (Kube). Paling tidak, ada sekitar 55 program atau proyek yang dilaksanakan sekitar 19 departemen/lembaga pemerintah non departemen (LPND) sejak 2004. Indikator keberhasilan pemberdayaan

Keberdayaan masyarakat Warga Madani dicirikan dengan timbulnya kesadaran bahwa, meraka paham akan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta sanggup menjalankan kewajiban dan tanggung jawab untuk tercapainya kualitas hidup yang dituntutnya. Kemudian, berdaya yaitu mampu melakukan tuntutan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya, mandiri dalam kemampuan berkehendak menjalankan inisiatif lokal untuk menghadapi masalah ekonomi dan lingkungan di sekitarnya. Dan, secara aktif tidak saja memperjuangkan aspirasi dan tuntutan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat secara terus menerus, tetapi juga melakukan inisiatif lokal.

Kemandirian dapat dilihat dari kemandirian individu dan kemandirian kelompok. Kelompok juga akan maju jika ada orang menjadi pelopor atau penggerak di komunitasnya. Jadi peranan individu bisa saja dapat menjadi tulang punggung bagi kemajuan komunitasnya. Pemberdayaan memerlukan keseriusan bagi pelakunya. Tantangan proyek yang berorientasi kepada pemberdayaan, bukan hanya dituntut untuk mempertahankan profesionalisme bagi para pelakunya, tetapi harus menjadi komitmen bersama dari seluruh unsur *stakeholders* yang terlibat dalam proyek bersangkutan. Menurut Tilden: dalam Arifin (2003), mengenai keterampilan dan sikap apa yang harus dimiliki oleh pelaku pemberdaya, sekurang-kurangnya ada 4 (empat) kegiatan penting yakni: *Problem solving* (pemecahan masalah); *Sense of Community* (peduli terhadap masyarakat); *Sense of mission* (komitmen terhadap misi proyek); dan *Honesty with self and with others* (jujur kepada diri sendiri dan orang lain).

Menurut Rahayu (2006), dalam bukunya “Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan. Jamasy (2004), menyatakan bahwa para pelaku program pemberdayaan, harus profesional dan komitmen untuk mewujudkan seluruh prinsip pemberdayaan ke dalam setiap kegiatan aksi program. Dikatakannya ada dua belas prinsip yang harus dijadikan kekuatan internal pelaku pemberdaya. *Pertama*, para pelaku utama pemberdaya dan seluruh unsur *stakeholders*, harus berlaku adil (melaksanakan prinsip kerja berdasarkan keadilan dan komitmen untuk meningkatkan kualitas kerja yang adil). Dari sekian banyak arti dan bentuk perilaku adil, setidaknya dua hal diantaranya akan menjadi sangat penting yakni: Keadilan distribusi dan keadilan prosedural. Twelvetrees (1991), membagi perspektif teoritik pemberdayaan masyarakat ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional dan pendekatan radikal. Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu, berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab kelemahan mereka, serta analisis sumber-sumber ketertindasannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Payne sebagai sebuah model pendekatan dengan dukungan minoritas masyarakat, sebagai contoh penggambaran perhatian terhadap keseimbangan ketetapan pelayanan. Pendekatan profesional dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra transformatif.

Tori yang digunakan sebagai bingkai pelaksanaan penelitian adalah teori strukturasi dari Antony Giddens. Menurut teori strukturasi, domain dasar kajian-kajian ilmu sosial bukanlah pengalaman masing-masing aktor ataupun keberadaan setiap bentuk totalitas kemasyarakatan, melainkan praktik-praktik sosial yang terjadi di sepanjang ruang dan waktu (Giddens, 2010:3). Menurut Giddens aktivitas-aktivitas sosial manusia, seperti halnya benda-benda alam yang berkembang biak sendiri, saling terkait satu sama lain. Aktifitas-aktivitas sosial itu tidak dihadirkan oleh para aktor sosial, melainkan diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana mengungkapkan diri mereka sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka, para agen mereproduksi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu.

## 2. Roadmap Penelitian

Tahun 2006, peneliti bersama tim peneliti Universitas Andalas melakukan pemetaan program pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di pedesaan, khususnya di Sumatera Barat. Pada umumnya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan terutama yang menggunakan pendekatan pemberdayaan belum berhasil. Kegagalan program pemberdayaan terutama pada aspek keberlanjutan program sebagai aspek utama program pemberdayaan. Hal ini disebabkan selama ini program pengentasan kemiskinan yang dilakukan lebih banyak diperankan oleh orang luar. Orang luar yang dimaksud adalah para pembawa program, baik instansi pemerintah maupun organisasi non pemerintah (LSM).

Tahun 2010, peneliti melakukan penelitian tentang pengentasan kemiskinan berbasis nagari, mencoba melihat sejauh mana institusi lokal nagari dapat berfungsi mewujudkan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan di nagari. Dalam penelitian ini dicoba mengidentifikasi institusi lokal nagari yang berpotensi mendukung program pengentasan kemiskinan. Ternyata institusi local dalam bentuk kelambagaan informal

banyak terdapat di nagari, seperti nini mamak, kerapatan adat nagari, pemuda nagari, bundo kanduang nagari, dan lain sebagainya itu tidak bisa hanya salah satunya yang difungsikan di nagari. Keberadaannya berbeda di tiap nagari, oleh sebab itu perlu diidentifikasi terlebih dahulu mana yang lebih tepat difungsikan. Mestinya dilakukan sinergi diantara kelembagaan lkal yang ada di nagari.

Tahun 2012, peneliti mencoba melihat fungsi tokoh adat dan ulama dalam pengentasan kemiskinan berbasis institusi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat dan ulama adalah tokoh yang cukup dekat dengan masyarakat. Namun lembaga ini tidak memiliki kemampuan dalam strategi dan kemampuan financial untuk melakukan program pengentasan kemiskinan berbasis institusi llokal. Untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Salah satu potensi yang sering memberikan bantuan selama ini adalah perantau. Perantau selama ini adalah komponen kelembagan local yang lebih banyak membantu dalam aspek keuangan. Mereka mengirim uang dari rantau, namun selama ini belum dikelola untuk kepentingan produktif. Migran internasional merupakan salah satu perantau yang memberi kontribusi cukup besar terhadap pembangunan daerah asal. Maka tahun 2014-2016 peneliti mencoba meneliti dan merumuskan model pemberdayaan institusi lokal melalui pemanfaatan remitan migran internasional di daerah asal. Bagaimana model yang lebih tepat melakukan program pengentasan kemiskinan berbasis institusi lokal melalui sinergi pemberdayaan institusi lokal melalui pemanfaatan remitan migrant internasional, namun hasil peneltian menunjukkan bahwa sinergi perantau domestic dan internasional adalah strategi yang tepat dalam mengelola remitan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin atau yang dikenal dengan pengentasan kemiskinan telah lama beralangsung, baik di nagari Sikabu maupun nagari Sungai Tanang. Nagari mandiri pangan adalah program pengentasan kemiskinan dinas pangan provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang diwakili oleh nagari development centre. Saat program dimulai, pemerintah nagari diikuti secara aktif sejak awal, dengan mengundang perwakilan dari pemerintah nagari sejak semula.

Hasil penelitian di dua nagari menemukan bahwa institusi lokal yang mendukung pelaksanaan program antara lain; pertama berkaitan dengan nilai yang menunjang peningkatan hasil pangan yaitu masyarakat menjadikan ketersediaan pangan pada perioritas utama, dimana ketika masyarakat diajak berdiskusi tentang ketersediaan pangan akan mendapatkan respon positif. Ketersediaan pangan bagi masyarakat adalah suatu yang mutlak dibanding dengan kebutuhan lain seperti papan dan sandang. Di kedua lokasi peneltian punya ungkapan yang sama untuk istilah bekerja sehari-hari, yaitu untuk mencari makan. Dalam bahasa Minangkabau mereka ungkapkan pergi bakureh atau cari makan ketika seseorang ditanya saat dia pergi bekerja seperti menerima upah, bahkan jika pergi ke kantor sekalipun. Ungkapan tersebut dibenarkan oleh masyarakat bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan sehari-hari dilakukan setiap orang, tujuan utama adalah untuk menghasilkan uang untuk membeli beras (sembako) kebutuhan utama, perioritas selanjutnya adalah untuk biaya sekolah termasuk papan sandang, dan kebutuhan sekunder. Nilai yang masih berlaku di masyarakat tentang pemenuhan kebutuhan pangan pada prinsipnya adalah modal yang sangat besar, bila dilihat dari sudut pandang teori modal sosial baik dikemukakan Putnam (2004), coleman, maupun oleh Lawang (2004) mengungkapkan bahwa kapital manusia sebagai

kemampuan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Selain itu, definisi kapital manusia lainnya, yaitu mengutip definisi dari *Organisation for Economic Cooperation and Development*. Disana dijelaskan bahwa kapital manusia sebagai pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan atribut serupa lainnya yang ada pada seseorang yang relevan dalam kegiatan ekonomi.

Pengetahuan masyarakat dalam bidang pertanian tidak diragukan lagi dalam menunjang peningkatan hasil pertanian, mulai dari mengolah tanah, budi daya tanaman, penggunaan pupuk dan alat pertanian memadai untuk dasar melakukan usaha pertanian. Bila menerapkan inovasi baru dalam bidang pertanian, tidak butuh waktu lama mengajarkan petani untuk menerapkan, cukup memberikan keterampilan teknis tertentu bila ada perlakuan spesifik untuk program pengembangan usaha pertanian.

Lahan pertanian sangat penting oleh petani sebagai media dasar penerapan program pertanian, baik skala kecil maupun skala besar. Walau tidak tersedia lahan yang luas untuk usaha pertanian berskala besar seperti perkebunan, namun terdapat nilai dan tat acara kepemilikan lahan yang menjamin ketersediaan lahan di masyarakat. Sistem kepemilikan lahan dengan system pusaka tinggi dapat menjamin ketersediaan lahan bagi setiap rumah tangga. Kepemilikan tanah dengan system kekerabatan matrilineal, dapat memproteksi lahan pertanian dari tantangan lahan pertanian pada umumnya seperti perpindahan hak milik, alih fungsi lahan dan ketimpangan luas pemilikan lahan serta gep antara petani dan buruh tani. Kepemilikan lahan system pusaka tinggi di masyarakat Minangkabau adalah hak milik tanah pusaka oleh kaum, bukan perorangan, dan tidak boleh menjual tanah pusaka tinggi ini, kecuali untuk keperluan yang mendesak sekali seperti kematian, renovasi rumah gadang yang bocor, biaya perhelatan anak gadis yang sudah rawan usia pernikahan dan biaya pemakaman jenazah. Persyaratan tersebut untuk saat ini tidak dibutuhkan lagi, karena secara umum dapat terpenuhi oleh anggota kaum tanpa menjual harta pusaka (lahan pertanian). Hampir semua rumah tangga memiliki lahan pertanian, hanya saja luas dan kualitas yang membedakan. Pemerataan kepemilikan lahan pertanian yang ada sebagaimana juga fenomena umum pada masyarakat Minangkabau lainnya di Sumatera Barat mengurangi gep antara keluarga kaya dengan keluarga miskin, atau antara petani dengan buruh tani. Sedikit sekali jumlahnya rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian sama sekali, itu umumnya adalah pendatang di nagari tersebut. Walau tidak punya lahan pertanian yang luas, masih memiliki pekarangan yang bisa dimanfaatkan.

Kebiasaan masyarakat bekerjasama dalam kelompok juga sebuah potensi besar untuk program nagari mandiri pangan. Untuk beraktivitas bagi masyarakat secara berkelompok yang merupakan salah satu kekuatan mewujudkan program pertanian tidak asing bagi masyarakat, baik di Sikabu maupun di Sungai Tanang. Saat ini di kedua lokasi penelitian telah berdiri beberapa kelompok tani, bahkan di sungai tanang telah muncul keinginan membentuk gabungan kelompok tani. Selain kelompok tani laki-laki juga terdapat kelompok tani perempuan, mereka menyebutnya dengan KWT (kelompok wanita tani). Kebiasaan ini tentu saja sangat potensial mewujudkan nagari mandiri pangan. Lembaga yang baru didirikan adalah BUMNAG (badan usaha milik nagari), kedua lokasi memiliki lembaga tersebut. BUMNAG ini memang punya potensi untuk dikembangkan, karena selain program nasional, masyarakat juga mengimpikan lahirnya badan usaha ini untuk menopang usaha pertanian masyarakat.

Namun belum terlihat arah pengembangan Bumrag oleh masyarakat, umumnya belum bisa membedakan bumrag dengan koperasi, sementara koperasi belum dipandang sebagai lembaga yang dapat menopang ekonomi masyarakat. Pemerintah nagari melihat Bumrag punya potensi mendukung ekonomi masyarakat, karena berbeda dengan koperasi yang lebih terfokus kepada kepentingan anggota, tapi Bumrag mengakomodasi semua kepentingan anak nagari.

Hambatan kultural mewujudkan nagari manri pangan antara lain adalah kebiasaan sebageian tenaga produktif yang banyak menghabiskan waktu di warung. Duduk di warung dilakukan tidak hanya pada saat istirahat, namuan dilakukan pada jam kerja. Hasil observasi menemukan bahwa pada siang hari beberapa warung penuh oleh angkatan kerja produktif, kebiasaan seperti ini menghambat percepatan nagari mandiri pangan. Tokoh masyarakat membenarkan bahwa kebiasaan duduk di warung pada siang hari menyebabkan rendahnya produktivitas masyarakat. Oleh sebab itu perlu dirancang program yang lebih menarik bagai masyarakat, sehingga menyebabkan orang merubah kebiasaan dari nongkrong di warung kepada mengurus uasahnya sendiri.

#### **4. Kesimpulan**

Ketika diterapkan program nagari mandiri pangan, potensi institusi lokal akan bekerja bila dalam pelaksanaan program memperhatikan nilai dan potensi lokal sejak awal pelaksanaan program. Pelaksanaan program yang berada di luar kebiasaan masyarakat lokal tidak bisa berjalan seperti keadaan normal, butuh langkah antara sebelum mencapai tujuan utama. Tujuan antara yang dimaksud adalah adanya perlakuan khusus sebelum atau simultan dengan pelaksanaan program, misalnya ketika pelaksanaan program diversifikasi bahan makanan karbohidrat, maka perlu perlu program penyadaran tentang nilai gizi makanan. Kebiasaan masyarakat mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok tidak mudah digantikan dengan karbohidrat selain beras, karena beras tidak hanya sebagai makanan pokok bagi masyarakat, tapi menjadi nilai dalam keluarga. Beberapa hambatan kultural dan structural mesti menjadi perhatian bagi pelaksana program, misalnya kebiasaan masyarakat selama ini duduk di warung pada siang hari, pola mata pencaharian masyarakat tidak focus dengan pertanian, membutuhkan kegiatan antara yang bertujuan memberikan penyadaran dan meyakinkan masyarakat bahwa dengan usaha pertanian dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

#### **Daftar pustaka**

Benda-Beckmann F.v. 1979. Property in social continuity; continuity and change in maintenance of property relations through time in minangkabau, West Sumatra, Denhaag: Martinus Nijhoff.

Benda-Beckmann F.v.. 1984. Goyahnya Tangga Menuju Mufakat (terjemahan), Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Benda-Beckmann F.v.. 2000. Properti Dan Kesenambungan Sosial, Jakarta: Grasindo.

Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September 2006.

Burhan, Bungin (editor), 2001. Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: Raja Gafindo Persada,.

- Chatra, Emeraldy.1999. Adat Salingka Desa, Padang: Pusat Studi Pembangunan Dan Perubahan Sosial Budaya Unand.
- Deddy, Mulyana, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial lainnya, Bandung: Reamaja Rosdakarya.
- Djajadiningrat. 2003. Community Development Dalam Paradigma Pembangunan Berkelanjutan, dalam: Rudito, Bambang : Akses Peran Serta Masyarakat. Jakarta : Pustaka Sinar harapan.
- Efi, Yandri, et al.2003. Nagari Dalam Perspektif Sejarah, Padang: Penerbit Lentera 21.
- Erwin. 2006. Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial Pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Padang : Andalas University Press.
- Benda-Beckmann F.v.. 2006. Tanah Kumunal dalam Masyarakat Minangkabau, dalam : Alfian Miko (ed). Pemerintah Nagari dan Tanah Ulayat, Padang : Andalas University Press.
- Felix, Adam, 2006. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat, www. Ensiklopedia, diakses tanggal 1 Mei 2008.
- Field, John. 2010. Modal Sosial, (terjemahan, Nurhadi), Yogyakarta; Kreasi Wacana.
- Gertz, C, 1976. Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia, Bhratara, Jakarta.
- Giddens, Anthony. 2002. Sociology, Cambridge: Polity Press.
- Benda-Beckmann F.v.. 2003. Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial. Pasuruan: Pedati.
- Hakimy, Idrus. 1979.Pokok Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkaba. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Herkovits, Melville J, 1999, “Organisasi Sosial: Struktur Masyarakat”, dalam TO Ihromi (ed) Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hikmat, Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model & Strategi Pengembangan Berbasis Kerakyatan, Bandung: Humaniora.
- Indraddin. 2011. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nagari, Padang : Jurnal Sosiologi Andalas volume IX nomor 1.
- Benda-Beckmann F.v. 2016. Strategi dan Perubahan Sosial, Yogyakarta: Deepublish.
- Ife, Jim, 1995. Community Development CreatingCommunity Alternatives-vision, analysis and practice, Melbourne, Longman Australia Pty Ltd.

- Jamasy, Owim. 2006. Keadilan Pemberdayaan , & Penanggulangan Kemiskinan, Yogyakarta: Mizan Pustaka.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik Dan Modern, jilid 2, Jakarta: PT. Gramedia.
- Novirianti, Dewi. 2005. Pemberdayaan Hukum Perempuan Untuk Melawan Kemiskinan. Jurnal Pemberdayaan Perempuan, No.42 tahun 2005.
- Rahayu, M.A.A. 2006. Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam : <http://www.binaswadaya.org/files/Pemberdayaan-masyarakat-desa.pdf>
- Sarumpaet, Susi.2005. The Modified Grameen Bank: A Sustainable Financing Shceme for Micro Enterprise in Indonesia, Camberra: Journal of Asia Etrepreneuship and Sustainability.Depdikbud RI.
- Wahyudi, Isa. 2008. Metodologi Perencanaan Partisipatif. Malang: Malang Corruption Wath.